

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**
(Studi Empiris Pada OPD Kota Dumai)

**Oleh :
Debby Nadya Edlin
Pembimbing : Taufeni Taufik dan Yuneita Anisma**

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : debinadya88@gmail.com

*Influence of Capacity Human Resources, Utilization of Information Technology and
Government Internal Control System on Quality of Financial Statements with
Organizational commitment as Moderating Variable
(Empirical Study at Dumai City Regency Regional Device Organization)*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Capacity Human Resources, Utilization of Information Technology and Government Internal Control System on Quality of Financial Statements with Organizational commitment as Moderating Variable Empirical Study at Dumai City Regency Regional Device Organization. The data used in this study is the primary data. The population in this research is all OPD officer of Dumai City. The sample in this study were 81 people selected by using purposive sampling. The analysis in this study was conducted using WarpPLS 5.0. The results of this study indicate that the Capacity Human Resources and Utilization of Information Technology affect the Quality of Financial Statements while the Government Internal Control System do not on Quality of Financial Statements. The Organizational commitment moderates the relationship between the Capacity Human Resources and Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Statements. However, the Organizational commitment does not moderate the relationship between the presentation of Government Internal Control System on the Quality of Financial Statements.

Keywords : Capacity Human Resources, Utilization of Information Technology, Government Internal Control System, Quality of Financial Statements, Organizational commitment

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah

memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik, sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara adalah berupa penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010), dalam permana (2011) adalah: “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Keberhasilan pemerintah dinilai dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban telah berakhirnya tahun ajaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, (Mursyidi, 2009).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang direvisi lagi dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Opini (TMP)

Sampai saat ini masih banyak laporan keuangan pemerintah di Indonesia yang belum mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 opini WTP mengalami penurunan sebesar 6 poin persen dari 71% menjadi 65% pada tahun 2015, opini WDP mengalami kenaikan sebesar 9 poin persen dari 21% menjadi 30% pada tahun 2015 dan opini TMP mengalami penurunan sebesar 3 poin persen dari 8% menjadi 5% pada tahun 2015. (<http://www.bpk.go.id>)

Begitu juga dengan Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai dari hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini

Wajar Dengan Pengecualian dari 2012 sampai dengan 2015, suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dari tahun ke tahun Kota Dumai tidak mengalami perubahan opini.

Melihat dari sejarah perkembangan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai dari tiga tahun belakangan yang setiap tahunnya mendapatkan opini WDP yang mana data ini didapat dari lampiran Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Dumai, ini menandakan bahwa laporan pemerintah daerah Kota Dumai masih banyak terdapat kesalahan serta belum adanya peningkatan terhadap pengelolaan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai dan hal ini harus diperbaiki lagi oleh Pemerintah Kota Dumai untuk periode berikutnya agar laporan keuangan ditahun yang akan datang bisa mendapatkan opini audit WTP dari BPK perwakilan Provinsi Riau (<http://pekanbaru.bpk.go.id/?p=17458>)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendy dan Sekretaris Daerah Kota Dumai (mewakili Walikota Dumai) Drs. H. Said Mustafa, M.Si. di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Rabu, 3 Juni 2015 pukul 09.00 WIB. Opini tersebut mengacu pada Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 tahun 2006, yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan BPK RI memuat opini atas laporan keuangan. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II memuat atas Sistem

Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015. BPK menemukan adanya **kelemahan sistem pengendalian intern** dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Rekening Pemerintah Kota Dumai belum ditetapkan penggunaannya dan terdapat 91 rekening yang belum jelas kepemilikannya dan penggunaannya; (2) Penata usahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Dumai belum memadai; (3) Aset Lainnya-Aset Lain-lain tidak dapat diyakini kewajarannya; (4) Adanya perjalanan dinas fiktif pada empat OPD Pemerintah Kota Dumai. BPK juga menemukan adanya **ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pemberian insentif Pajak dan Retribusi Daerah pada empat SKPD tidak sesuai dengan ketentuan; (2) Terdapat kelemahan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan dan terdapat kelebihan pembayaran pada delapan paket pekerjaan. (<http://pekanbaru.bpk.go.id>).

Variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia. Menurut Yosefrinaldi (2013), Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki keahlian dibidangnya, maka

akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Hasil dari penelitian Yosefrinaldi (2013) menyebutkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Desiana Wati (2014) juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2015) memberikan hasil bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan penelitian Aditya Sanjaya (2016) sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selanjutnya Variabel bebas yang kedua dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Dari penelitian Soimah (2014) dan Yosefrinaldi (2013) menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel bebas yang ketiga dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; (5) pemantauan pengendalian intern. Dalam PP 60 tahun 2008, seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern.

Dari hasil penelitian Soimah (2014) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Desi Sefri Yensi (2014) menunjukkan bahwa

sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Aditya Sanjaya (2016) menghasilkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Komitmen Organisasi. Sebagai wujud dalam pencapaian tujuan organisasi, Komitmen Organisasi merupakan faktor yang memiliki peranan penting. Komitmen Organisasi merupakan keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi akan menunjukkan kesediaan untuk mempertahankan keanggotannya dalam organisasi dan berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Komitmen Organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, Komitmen Organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pegawai terhadap organisasi. Jika pegawai merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan (Ratifah dan Ridwan 2012).

Dalam penelitian ini Komitmen Organisasi dijadikan variabel moderasi, karena Komitmen Organisasi memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan antara Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan SPIP dengan Kualitas LKPD. Peneliti berpendapat bahwa, Komitmen Organisasi yang kuat akan mendorong anggota untuk bekerja keras mencapai

tujuan organisasi. LKPD yang berkualitas merupakan salah satu tujuan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan Kapasitas SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP agar Kualitas LKPD meningkat. Alasan lain Komitmen Organisasi dijadikan variabel moderasi karena terdapat perbedaan penelitian.

Dalam penelitian Rahmawati (2015), Komitmen Organisasi secara signifikan memoderasi pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan dalam penelitian Siwambudi, Yasa, dan Badera (2016), interaksi Komitmen Organisasi dengan Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan interaksi Komitmen Organisasi dengan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga peneliti ingin menguji ulang pengaruh Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian YSiwambudi, Yasa, dan Badera (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen, waktu serta lokasi penelitian. Penelitian ini menambahkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang didapat dari penelitian Yosefrinaldi (2013)

TELAAH PUSTAKA

Kualitas LKPD

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010), dalam permana (2011) adalah: "Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan

standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan syarat dapat dikatakan berkualitas, yaitu : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kata Kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan JICA, (2004) dalam yosefrinaldi (2013).

Kapasitas Sumber Daya Manusia, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman

yang cukup memadai untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpanan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*) (Mulyadi, 2010 dalam soimah, 2014).

Dalam PP No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Intern adalah proses integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian resiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; (5) pemantauan pengendalian intern.

Dalam PP 60 tahun 2008, seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern.

Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi menunjukkan satu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi sehingga akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi karyawan terhadap organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2008 :100) mendefinisikan komitmen organisasional adalah : “Suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu. Sementara karyawan yang memiliki organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut dan akan lebih berusaha dalam memberikan kinerja yang baik untuk membantu pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki keahlian dibidangnya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan. seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

H₁: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu pegawai-pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam mengolah data

keuangan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. maka semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

H₃: SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian

tujuan organisasi dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya komitmen pegawai yang rendah cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi yang tinggi dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya agar tujuan organisasi dapat tercapai, sehingga semakin tinggi Komitmen Organisasi, maka semakin tinggi pula Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₄: Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran untuk menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar penyajian laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Komitmen Organisasi, maka semakin tinggi pula Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₅: Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen Organisasi yang tinggi dari seluruh pegawai memudahkan suatu organisasi mewujudkan pengendalian intern yang memadai dalam memberikan keyakinan tentang keandalan laporan keuangan

kepada pengguna. Sebaliknya tanpa komitmen organisasi yang tinggi akan sulit mewujudkan pengendalian intern yang memadai guna menjamin kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi Komitmen Organisasi, maka semakin tinggi pula Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₆: Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh SPIP dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Dumai yang berjumlah 27 OPD.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa yang menjadi sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diambil dari tiap-tiap untuk organisasi perangkat daerah adalah sebanyak 3 orang yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendaharawan, dan Staff Bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Dumai.

Dengan kriteria yang dipilih adalah pejabat eselon IV di OPD (dinas, kantor dan badan) dan sudah menjabat minimal selama 1 tahun. Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini di masing-masing OPD berjumlah 3 orang. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian

ini berjumlah 81 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Sumber data dari penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat didasarkan dari penelitian terdahulu. Kuesioner akan dikirimkan kepada responden (kepala bagian keuangan, bendahara keuangan dan staff keuangan) disetiap OPD di kota Dumai.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Dalam PP no 71 tahun 2010 Dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Indikator variable terdiri dari Aktivitas keuangan di masalalu, memprediksi masa yang akan datang, ketepatanwaktuan penyajian, pengambilan keputusan, disajikan wajar dan jujur, informasi dapat dibandingkan, serta informasidalam laporan keuangan dapat dipahami, sesuai SAP.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Yosefrinaldi, 2013). Indikator variabel kapasitas sumber daya manusia dilihat dari Pendidikan, Tanggungjawab, Pelatihan, dan Pengalaman.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi Informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi infomasi untuk

menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Indikator variabel terdiri dari jaringan internet dan komputer, proses akuntansi dan pelaporan, jadwal pemeliharaan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator variabel sistem pengendalian intern pemerintah dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008.

5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi menunjukkan satu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi sehingga akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi karyawan terhadap organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2008 :100) mendefinisikan komitmen organisasional adalah : “Suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.” variabel Komitmen Organisasi dilihat dari Komponen Afektif, Komponen Normatif dan Komponen Berkelanjutan.

Metode analisis data

Alat analisis data dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan menggunakan *software WarpPLS 5.0*. PLS-SEM adalah metode untuk menguji secara

simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linier ataupun nonlinear dengan banyak indikator baik berbentuk mode A (refleksif) atau mode B (formatif). (Ghozali, 2016:3).

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Kuncoro (2013:198), analisis statistik deskriptif terdiri dari kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga bisa ditafsirkan, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, sehingga dapat menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat ditafsirkan secara singkat dan penuh makna.

Analisis Statistik Inferensial

Statistik Inferensial yang digunakan dalam penelitian ini mengaplikasikan metode *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program *WarpPLS 5.0*. Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan, dimulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

Pengukuran Model (Outer Model)

Pengukuran Model atau *Outer Model* sering juga disebut *outer relation* atau *measurement model* mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya.

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. (Sarwono, 2014;18)

Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah ketika suatu skala pengukuran telah melakukan apa yang harus dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur, bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan

apa yang seharusnya dilakukan (Kuncoro, 2013:172). Terdapat dua jenis validitas dalam *PLS SEM*, yaitu validitas kovergen dan validitas diskriminan. (Sarwono, 2014;19)

Uji Realibilitas

Reabilitas adalah mengukur kualitas dari pengukuran instrument, instrument itu biasanya satu set pertanyaan-pertanyaan, instrument pengukuran memiliki keandalan yang baik jika pernyataan (atau tindakan lainnya) terikat dengan setiap LV dipahami dengan cara yang sama oleh responden yang berbeda. Kock (2011) dalam Sholihin (2013).

Dalam *PLS-SEM* dengan menggunakan program *WarpPLS 5.0*, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dari nilai *Crombach alpha* atau *composite reliability*. Apabila nilai *Crombach alpha* atau *composite reliability* yang dihasilkan ≥ 0.70 (*confirmatory research*) maka semua konstruk dapat dikatakan *reliable*. Namun jika *Cronbach alpha* atau *Composite Reability* > 0.6 masih dapat diterima untuk *Explatory Research*. (Sarwono, 2014;18)

Pengukuran Model Struktural (Inner Model)

Model Struktural atau *Inner Model* menurut (Sarwono, 2014;23) adalah model yang menghubungkan antar variabel laten dependen terhadap variabel laten independen. Pengujian pada tahap ini yaitu: Pengujian dengan melihat nilai *R-Square*.

Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh (simultan). digunakan kriteria apabila $p\text{-value} < 0.05$ (level alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Tetapi jika $p\text{-value} > 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mengetahui besarnya proporsi variance kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai *effect size*. Menurut Sholihin & Ratmono (2013) *effect size* dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: lemah (0.02), medium (0.15), dan besar (0.35).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Kuesioner yang disebar sejumlah 102 kuesioner. Dari 81 kuesioner yang disebar, ada 9 kuesioner yang tidak kembali karena disebabkan oleh kesibukkan pejabat pemerintah daerah dan sebagian pejabat tidak berada ditempat sehingga tidak bisa mengisi kuesioner yang diberikan.

Analisis Statistik Inferensial

Hasil Uji Validitas

Selain melihat dengan *loading factor*, untuk menguji *validitas convergent* maka dapat juga dengan melihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*). Apabila nilai AVE yang dihasilkan semua konstruk lebih dari 0.50 maka konstruk memenuhi persyaratan validitas *convergent* (Latan dan Ghozali, 2012:81).

Hasil uji validitas *convergent* dengan melihat nilai telah memenuhi kriteria validitas *convergent* yaitu lebih dari 0,50. Dimana hasil dapat dilihat dari variabel Y yaitu Kualitas laporan keuangan yang memiliki nilai sebesar 0.707, variabel X1 yaitu kapasitas SDM yang memiliki nilai sebesar 0.706, variabel X2 yaitu pemanfaatan TI yang memiliki nilai sebesar 0.613, variabel X3 yaitu SPIP yang memiliki nilai sebesar 0.648 dan variabel Z yaitu komitmen organisasi yang memiliki nilai sebesar 0.640

Hasil Uji Reliabilitas

Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program WarpPLS5.0 untuk mengukur reabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*.

Apabila nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang dihasilkan lebih dari 0,70 (*confirmatory research*) maka semua konstruk dapat dikatakan *reliable*. Dapat dilihat dari variabel Y yaitu Kualitas laporan keuangan yang memiliki nilai sebesar 0.958, variabel X1 yaitu kapasitas SDM yang memiliki nilai sebesar 0.953, variabel X2 yaitu pemanfaatan TI yang memiliki nilai sebesar 0.895, variabel X3 yaitu SPIP yang memiliki nilai sebesar 0.963 dan variabel Z yaitu komitmen organisasi yang memiliki nilai sebesar 0.919

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis 1 memiliki *p-value* $0.001 < 0.05$ sehingga H_1 **diterima**. Diperoleh pengaruh langsung variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 40% dan signifikan dengan nilai $p=0.001$. *Effect size* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0.02), medium (0.15), dan besar (0.35). Hasil menunjukkan *effect size* variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.296 termasuk kelompok medium.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis kedua memiliki *p-value* $< 0.001 < 0.05$ sehingga H_{a2} **diterima**. Diperoleh pengaruh langsung variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas

laporan keuangan adalah sebesar 55% dan signifikan dengan nilai $p < 0.001$. *Effect size* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0.02), medium (0.15), dan besar (0.35). Hasil menunjukkan *effect size* pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.444 termasuk kelompok besar.

Pengaruh SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis kedua memiliki *p-value* $0.146 > 0.05$ sehingga H_{a3} **ditolak**. Diperoleh pengaruh variabel SPIP terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 12% dan signifikan dengan nilai $p=0.146$. *Effect size* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0.02), medium (0.15), dan besar (0.35). Nilai *effect size* di bawah 0.02 menunjukkan bahwa pengaruh variabel laten prediktor sangat lemah dari pandangan praktis meskipun memiliki nilai p yang signifikan. Hasil menunjukkan *effect size* variabel SPIP terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0.012 termasuk kelompok lemah.

Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis memiliki *p-value* $0.004 < 0.05$ sehingga H_{a4} **diterima**. Diperoleh bahwa Komitmen Organisasi memoderasi hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan dengan koefisien 29% dan nilai signifikan $p=0.004$. *Effect size* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0.02), medium (0.15), dan besar (0.35). Hasil menunjukkan *effect size* variabel komitmen organisasi memoderasi kapasitas sumber daya manusia terhadap

kualitas laporan keuangan sebesar 0.162 termasuk kelompok medium.

pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa bahwa hipotesis memiliki $p\text{-value } 0.003 > 0.05$ sehingga H_{a5} **diterima**. Diperoleh bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan koefisien 30% dan nilai signifikan $p=0.003$. *Effectsize* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0.02), medium (0.15), dan besar (0.35). Hasil menunjukkan *effect size* variabel komitmen organisasi memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0.182 termasuk kelompok medium.

Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis memiliki $p\text{-value } 0.210 > 0.05$ sehingga H_{a6} ditolak. *Effect size* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0.02), medium (0.15), dan besar (0.35). Hasil menunjukkan *effect size* variabel komitmen organisasi memoderasi SPIP terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0.023 termasuk kelompok lemah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2014) dan Desiana Wati (2014) menyebutkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) memberikan hasil bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) dan Soimah (2014) menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Yensi (2014) yang menemukan pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015),

menyebutkan bahwa Komitmen Organisasi secara signifikan memoderasi pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Komitmen organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Hasil Pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi, Yasa, dan Badera (2016) yang memberikan hasil bahwa interaksi Komitmen Organisasi dengan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari masing-masing Responden.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP. Dan satu variabel moderasi yaitu, Komitmen Organisasi

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu:

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel moderasi, yaitu Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan

teknologi informasi, Sistem pengendalian intern pemerintah dan Komitmen Organisasi. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan bervariasi.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.
3. Untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup sampel sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo. 2006. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat : Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 no. 02 Hal. 18-30
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta :Erlangga
- Burhanudin dan Sunyoto, 2011. Perilaku Organisasi, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS23

- Haza, Irvan Ikhwanul. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD pemerintah Kota Padang) Fakultas Ekonomi Universitas Padang
- Hervesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang). Universitas Diponegoro. Semarang
- Judge dan Robbins stephen P Robbbins, Timottty A 2008. Perilaku Organisasi Edisi 12 buku I terjemahan Diana Angelica dkk, Jakarta, Salemba Empat
- Kuncoro. Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi
- Permana, Irvan. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com>
- _____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui www.google.com
- Rahmawati, Damini. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sragen)
- Salemba, Siti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatra Barat). Fakultas Ekonomi. UNPAD
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus). Skripsi. Universitas Muria Kudus.
- <http://bpk.go.id>
<http://pekanbaru.bpk.go.id>